

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pada dasarnya merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agent. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agent. Prinsipal mengontrak agent untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada agent sedangkan agent berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya, Jensen dan Meckling (1976).

Haryanto dkk (2007) dalam Faristina (2011) mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agent mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, sehingga masyarakat/agent mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah, (Rosalin, 2011). Hubungan rakyat sebagai prinsipal dan

kepala daerah sebagai agent Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemilihan ini merupakan pemberian otoritas eksekutif dan pelimpahan wewenang rakyat kepada pemerintah daerah (gubernur, bupati/walikota). Pemerintah daerah juga menerima pelimpahan wewenang atas pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku agent terhadap wewenang yang diberikan rakyat, wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang tertuang dalam anggaran pendapatan belanja daerah kepada rakyat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan. Dewan perwakilan rakyat daerah yang merupakan representasi keterwakilan rakyat selaku prinsipal adalah pengembang fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Kinerja kepala daerah akan dinilai dalam laporan pertanggungjawabannya kepada dewan perwakilan rakyat daerah tentang keberhasilan berbagai program dan kebijakannya yang tercermin pada realisasi anggaran pendapatan belanja serta opini laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh pemerintah daerah.

2.2 Partisipasi Masyarakat

Menurut Mardismo (2002) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Menurut Krina (2003) bentuk partisipasi yaitu:

1. Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen. Cara untuk mengetahui keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara aparat yaitu adanya aparat berpartisipasi dalam proses perencanaan anggaran /pembuatan SPJ/pelaporan keuangan, adanya keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara aparat.
2. Adanya forum untuk menampung partisipasi. Cara untuk mengetahui forum menampung partisipasi yaitu melakukan diskusi dengan atasan yang

berkaitan dengan proses perencanaan anggaran/ pembuatan SPJ/pelaporan keuangan, adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya.

3. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Cara untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yaitu masyarakat memberikan masukan dalam proses perencanaan anggaran/ pembuatan SPJ/laporan keuangan dan masukan masyarakat untuk perencanaan anggaran/pembuatan SPJ/pelaporan keuangan diterapkan dalam hasil akhir.
4. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi dan mengetahui fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi yaitu adanya forum pertemuan dengan kelompok masyarakat (musrenbang) yang berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, adanya fokus pemerintah dalam memberikan arahan mengundang orang lain untuk berpartisipasi.
5. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Cara untuk mengetahui akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses perencanaan anggaran/pembuatan SPJ/pelaporan dan laporan keuangan, adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses sistem dan mekanisme perencanaan, pengendalian, dan pembangunan daerah.

2.3 Akuntabilitas

Mahsun (2006) mendefinisikan akuntabilitas dalam arti luas dan sempit. Akuntabilitas dalam arti luas merupakan suatu kewajiban pihak yang menjalankan amanah untuk melakukan pertanggungjawaban dengan cara menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan kepada pihak yang berhak

menerima pertanggungjawaban tersebut dalam hal ini adalah pihak yang memberikan amanah.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertical dan akuntabilitas horisontal.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertical (*Vertical accountability*)

Pertanggung-jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung-jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung-jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggung-jawaban pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Pertanggung-jawaban kepada DPRD dan masyarakat luas. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa penyajian laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ada, serta kemudahan publik dalam mengakses laporan keuangan pemerintah.

Hal tersebut dilakukan agar publik (badan pemeriksa, masyarakat, maupun investor) dapat mengontrol pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Fauziyah, 2017). Berikut ini merupakan indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh Superdi (2017) antara lain:

1. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Pertanggung jawaban kepada public.
3. Terbuka, cepat dan tepat.
4. Penyusunan APBD.
5. Memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen.

2.4. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi (*transparency*) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- 1 Pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material tentang:
 - a. Keuangan dan hasil operasi perusahaan
Laporan keuangan yang sudah diaudit adalah sumber informasi yang berguna untuk memonitor kinerja keuangan dan menjadi dasar untuk aset sekuritas. Para menejer dan pengambilan keputusan seiring berdiskusi dengan menggunakan bahan dari laporan keuangan. Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan secara benar akan sangat bermanfaat
 - b. Tujuan-tujuan perusahaan
Tujuan perusahaan harus disosialisasikan kepada lingkungan bisnis dan masyarakat umum. Investor dan penggunaan lainnya terkadang melihat tujuan perusahaan untuk tujuan evaluasi antara operasi perusahaan dan langkah-langkah apa yang diambil perusahaan untuk mencapai tujuan.
 - c. Kepemilikan saham mayoritas dan hak-hak suara dengan adanya keterbukaan, para investor mendapatkan informasi yang berhubungan dengan hak hak

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good corporate governance*. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan–kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. (Mustofa, dkk, 2012) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik, (Sukhemi, 2011).

2.5 Sistem Pengendalian *Intern* (SPI)

Menurut Mardiasmo (2009) sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2015) Pengendalian intern merupakan salah satu pondasi terkuat good governance. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, dan menjamin pengamanan aset negara (Purnomo dan Budiawan 2014).

COSO adalah sebuah organisasi swasta, organisasi pada tahun 1992 mengeluarkan hasil sebuah studi untuk menghasilkan definisi pengendalian intern dan petunjuk untuk melakukan penilaian sebuah sistem pengendalian intern, yang dikenal dengan model pengendalian intern. Model pengendalian intern ini,

menetapkan pengendalian intern sebagai proses yang diterapkan oleh dewan direktur, manajemen, dan untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa tujuan pengendalian dapat dicapai. Pengendalian intern memberikan jaminan yang layak karena kemungkinan terjadinya *human failure*, kolusi, dan *management override* (Krismiaji, 2015) Pengendalian intern didefinisikan sebagai sebuah proses karena pengendalian intern ini melekat dalam kegiatan operasional sebuah organisasi, dan merupakan bagian yang integral dari aktivitas dasar manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan organisasi.. Berikut merupakan indikator dari sistem pengendalian intern menurut COSO dalam Krismiaji (2015) antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian Kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya.
2. Penilaian Resiko Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian resiko terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko.
3. Informasi dan Komunikasi Informasi adalah data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
4. Kegiatan Pengendalian Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang perlu, telah dilakukan untuk meminimalkan resiko dalam mencapai tujuan.
5. Pemantauan Pengendalian Intern Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian

intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

2.6 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, antara lain:

1. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki karakteristik: memberikan manfaat umpan balik (*feedback value*), memberikan manfaat prediktif (*predictive value*), disajikan tepat waktu (*timeliness*).
2. Andal (*reliability*) Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: penyajian jujur (*faithfulness of presentation*); dapat diverifikasi (*verifiability*); netralitas.
3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain umumnya.
4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Harus disadari bahwa

terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Mahmudi, 2013: 9)

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Penelitian, Tahun dan judul	Variabel	Metode	Hasil
1	Hamsinar (2017). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten Pinrang)	Variabel Independen: partisipasi masyarakat, akuntabilitas Variabel Dependen: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern.	Analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan, dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2	Andika Pratama (2017) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Variabel Independen: kompetensi sumber daya manusia, bidang aplikasi sistem akuntansi keuangan, dan peran audit internal Variabel Dependen: kualitas	Analisis statistik deskriptif dan regresi	hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pelaksanaan SAKD, peran audit internal yang signifikan berpengaruh pada kualitas LKPD. Tetapi ketika dimoderasi oleh variabel SPIP, kompetensi SDM

		laporan keuangan pemerintah daerah untuk dimoderasi sistem pengendalian internal pemerintah.		tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.
3	Melisha Nitasari Ferdilan Putri (2017). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Di Kabupaten Wonogiri).	Variabel Independen: aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern Variabel Dependen: akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD di kabupaten Wonogiri.	Analisis statistik deskriptif dan regresi	Hasil pengujian menyatakan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Wonogiri.
4	R. Ait Novatiani dan Nurmalita Lestari (2014) Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Di DPRD Kota Bandung.	Variabel Independen: akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan public Variabel Dependen: pengawasan keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan Hasil Penelitian Dapat Disimpulkan Bahwa Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Berpengaruh Yang Signifikan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

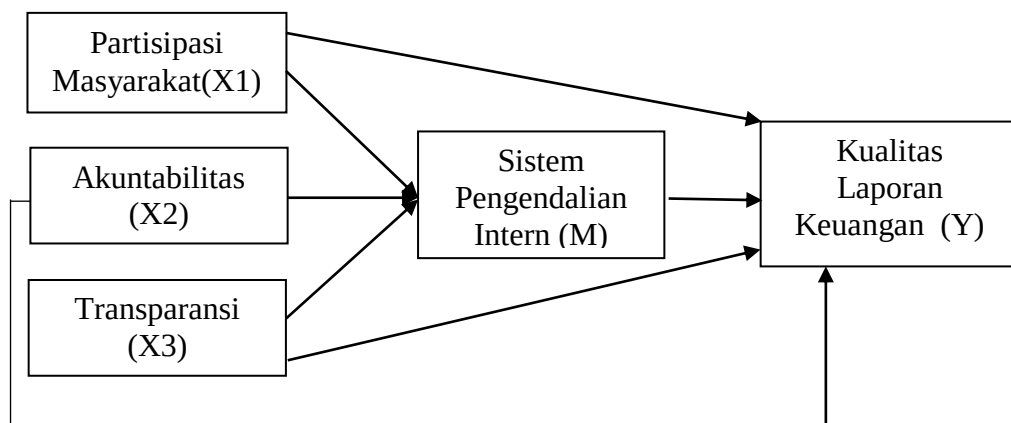
		daerah (APBD) pada DPRD kota Bandung		(APBD) Kota Bandung.
5	Verliani Dasmaran, Tri Yulaeli, Selfiani (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang	Variabel Independen: penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Variabel Dependen: kualitas laporan keuangan	Analisis statistik deskriptif dan regresi.	Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
6	Rosy Oktasari (2016). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Di DPRD Kabupaten Karanganyar	Variabel Dependen : Pengawasan Keuangan Daerah Variabel Independen : Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).
7	Anissa Putri Prabangsari (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen: penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan kompetensi	Analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

	Dengan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Badan Dan Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)	sumber daya manusia. Variabel Dependen: kualitas laporan keuangan dengan standar akuntansi berbasis akrual sebagai variabel intervening.		sedangkan Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
8	Budiarti, <i>et.all</i> (2019) Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal	Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, kapasitas aparatur, kinerja pengelolaan dana desa.	Analisis SEM	Transaparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kapasitas aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sedangkan sistem pengendalian internal gagal menjadi variabel moderasi pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
9	Luthfiani, <i>et.all</i> (2020) Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah	Kompetensi, Patisipasi masyarakat , akuntabilitas aplikasi siskeudes, kepatuhan pajak, akuntabilitas	Regresi Liniear Berganda	Kompetensi perangkat desa dan patisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan aplikasi siskeudes

				dan kepatuhan pajak bendaharawan desa berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.
--	--	--	--	---

2.8 Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi amanat oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan di daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, maka diperlukan adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi. Untuk lebih jelasnya disajikan kerangka pikir yang dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran, (Utami dan Efrizal, 2013).

Masyarakat terlibat dalam penyusunan APBD diharapkan masyarakat juga mengontrol semua kebijakan pemerintah dilapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. jika masyarakat telah mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang sebenarnya, maka diharapkan masyarakat akan terlibat dalam pengawasan anggaran, (Rahayu, 2010). Hasil penelitian Hamsinar (2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hamid (2007) dalam kusuma (2012) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban

Mengenai Pengelolaan Keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas, (Yahya, 2011).

Hasil penelitian Hamsinar (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.9.3 Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi kebijakan publik merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasi kebijakan tersebut. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya mis-alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi, (Kusuma, 2012).

Hasil penelitian Hamsinar (2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.9.4 Sistem Pengendalian Intern Dapat Memoderasi Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Partisipasi masyarakat dalam penelitian (pramita dan lilik, 2010), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi

dan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya, (Sofi, 2015).

Sistem pengendalian intern merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Karena dengan sistem pengendalian intern yang baik maka suatu organisasi akan dapat berjalan dengan baik, (sukmaningrum, 2012). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sistem pengendalian *intern* memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.9.5 Sistem Pengendalian Intern Dapat Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Akuntabilitas bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external control*) yang mendorong aparat untuk bekerja keras. Akuntabilitas public akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif dan mewujudkan *good governance*, (Kurniawan, 2012).

Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki fungsi untuk memberi keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan

aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang, (kartika, 2013). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Sistem pengendalian intern memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.9.6 Sistem Pengendalian Intern Dapat Memoderasi Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi kebijakan publik, dalam penelitian (Utami dan Efrizal, 2013), transparansi adalah keterbukaan dalam proses penganggaran, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Penelitian lain tentang transparansi dilakukan oleh (Kusuma 2012) penelitian penggunaan prinsip good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Transparansi anggaran merupakan salah satu konsep dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah di kabupaten sukoharjo, (rahmawati, 2013). Partisipasi masyarakat menjadi kunci sukses bagi pelaksanaan otonomi daerah, namun kenyataan dilapangan masyarakat tidak selalu berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada saat penyusunan anggaran (APBD) dan transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. artinya transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*.

Transparansi kebijakan publik merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui

apa yang akan terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasi kebijakan tersebut. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya mis-alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi, (Kusuma, 2012).

Peran Sistem Pengendalian Intern adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Pada tahun 2008, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Sistem pengendalian intern baru ditetapkan pada tahun 2010 yaitu PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern (SPI). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H6: Sistem pengendalian intern memperkuat pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.